

A. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Polres Takengon	27
B. Hambatan Yang Dihadapi Polres Takengon Dalam Pelaksanaan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	39
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

RINGKASAN

Nurhapsyah Rahayu
210510134

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Wilayah Polres Takengon)

(Sumiadi, S.H., M.Hum dan Dr. Shira Thani, S.H., M.H)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk tindak pidana yang berlingkup pada kehidupan berumah tangga. Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Instansi terkait belum memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Polres Takengon, serta untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi Polres Takengon dalam pelaksanaan perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, responden dan informan, serta penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data atau data sekunder melalui literatur-literatur dan penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini seperti Undang- Undang, buku-buku yang relevan dengan penelitian, karya ilmiah atau jurnal ilmiah, serta informasi yang dikutip dari internet.

Hasil penelitian diketahui bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Polres Takengon belum berjalan secara maksimal dikarena korban belum sepenuhnya mendapatkan hak-

haknya, terutama hak psikologis dan rehabilitasi. Kendala utama dalam pelaksanaannya berasal dari faktor masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai masalah pribadi, faktor individu korban yang sering takut melapor karena tekanan ekonomi atau sosial.

Saran dalam penelitian ini adalah agar diadakannya sosialisasi terkait procedural pengaduan, dan keahlian khusus bagi personel instansi dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban KDRT, Kepolisian.

SUMMARY

**Nurhapsyah Rahayu
210510134**

Legal Protection for Victims of Domestic Violence: A Case Study in the Takengon Police Resort Jurisdiction

(Sumiadi, S.H., M.Hum dan Dr. Shira Thani, S.H., M.H)

Domestic violence is a form of criminal offense that occurs within the scope of family life. The enforcement of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence by the relevant institutions has not yet provided adequate legal protection for victims of domestic violence. This research aims to identify and understand the efforts of legal protection for victims of domestic violence in the jurisdiction of Polres Takengon, as well as to examine and analyze the obstacles faced by Polres Takengon in implementing protection for domestic violence victims.

The method used in this research is empirical juridical research with a case approach. Data collection techniques consist of field research, where primary data is obtained through observation, interviews, and information from respondents and informants, and library research, which involves collecting secondary data from literature and previous research related to this study, such as laws and regulations, relevant books, scientific articles or journals, and information sourced from the internet.

The results of the study indicate that legal protection efforts for victims of domestic violence in the Polres Takengon area have not been fully effective, as victims have yet to receive all of their rights, particularly psychological support and rehabilitation. The main obstacles include societal factors, where domestic violence is still viewed as a private matter, and individual factors, where victims often fear reporting due to economic or social pressures.